

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2.1.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.

Definisi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 tentang SAP, dijelaskan bahwa :

“Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”

Selanjutnya menurut (Rusmana, Setyaningrum, Yuliansyah, & Maryani, 2019; 11) pengertian dari Standar Akuntansi pemerintah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP dirumuskan oleh sebuah komite independen yang disebut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dibentuk oleh Menteri Keuangan”.

Adapun penjelasan menurut (Yuesti, Sandrya Dewi, & Pramesti, 2020; 11) Standar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi pemerintah adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas”.

Sedangkan, menurut (Wardani, 2020; 22) pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan:

“SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah”.

Sejalan dengan itu, menurut Yoyo Sudiaryo (2019:33), Definisi Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas.”

Dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip yang perlu diterapkan oleh lembaga pemerintahan pusat maupun daerah dan hal tersebut mempunyai landasan hukum yang valid. Maka dari itu berarti lembaga pemerintah pusat maupun daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.1.2. Dimensi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut (Abdul Halim, 2019; 167) prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah yaitu :

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi selain Kas
4. Prosedur Akuntansi selain Aset

Selanjutnya, sesuai dengan penjelasan (Abdul Halim, 2019; 167) terhadap prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah bahwa:

1. Prosedur Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas. Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi penerimaan kas, terdiri dari:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D)
- b. Surat Tanda Setoran (STS)
- c. Bukti Transfer merupakan dokumen bukti atas transfer penerimaan daerah
- d. Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran, atas transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan pengeluaran kas. Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi pengeluaran kas, terdiri dari:

- a. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat perintah pencairan dana yang akan diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah.
- c. Kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.

- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk.
 - e. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti transfer pengeluaran daerah.
 - f. Nota debit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah.
3. Prosedur Akuntansi Selain Kas
- Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian selain kas. Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur selain kas, terdiri atas:
- a. Pengesahan pertanggung jawaban pengeluaran (pengesahan SPJ)
 - b. Berita acara penerimaan barang
 - c. Surat keputusan penghapusan barang
 - d. Surat pengiriman barang
 - e. Surat keputusan mutasi barang (antar OPD/SKPKD)
 - f. Berita acara pemusnahan barang
 - g. Berita acara serah terima barang
4. Prosedur Akuntansi Selain Aset
- Prosedur Akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan hingga pemeliharaan, pelaporan akuntansi atas rehabilitasi, penghapusan, pemindah tangan, perubahan klasifikasi, dan pelaporan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan. Adapun dokumen yang digunakan yaitu:
- a. Berita acara penerimaan barang
 - b. Berita acara serah terima barang
 - c. Berita acara penyelesaian pekerjaan

2.1.1.3 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pada dasarnya, tujuan SAP adalah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD

untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.

Menurut Indra Bastian (2019:39), Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.”

Adapun pendapat yang dikemukakan Abdul Halim (2019:167), Standar Akuntansi Pemerintah memiliki tujuan, yaitu:

1. “Tujuan untuk pertanggungjawaban, dalam tujuan pertanggungjawaban pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat
2. Tujuan untuk manajerial, dalam tujuan ini memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah.
3. Tujuan untuk pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintah harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawasan.”

Selanjutnya menurut Mahmudi (2020:271), Tujuan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Standar akuntansi pemerintah merupakan aspek penting yang diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintah.”

Sejalan dengan itu, menurut M. Budiantara (2019), Tujuan SAP pada lembaga pemerintah adalah sebagai berikut:

“Standar akuntansi pemerintah diterapkan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, penerapan standar akuntansi

pemerintah bertujuan akan memiliki banyak manfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum dengan kualitas yang lebih baik lagi bagi para pengguna laporan keuangan.”

Sedangkan menurut Dhedy Triwardana (2017), tujuan SAP adalah sebagai berikut:

“Standar akuntansi pemerintah bertujuan agar laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel.”

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan SAP adalah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.

2.1.1.4 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh kepada *stakeholder*. Selain itu dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

Menurut Nurmalia Hasanah, (2017:26) manfaat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

“SAP bermanfaat sebagai sebuah sistem pemecahan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat, daerah, maka dari itu SAP yang kredibel sangat diperlukan dalam sektor pemerintahan.”

Selanjutnya menurut Mardiasmo, (2018:186) Manfaat Standar Akuntansi

Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintah dengan diterapkannya akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan dengan akuntansi basis kas. Akuntansi basis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan sebuah keputusan ekonomi, sosial, dan politik.”

Sedangkan menurut Rindu Rika Gamayuni (2018:12), standar akuntansi memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1. “SAP menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
2. SAP menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
3. SAP menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
4. SAP menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya
5. SAP menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
6. SAP menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagaimana akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.”

Menurut Enda Baisida Lauma, dkk (2016) manfaat standar akuntansi pemerintah, yaitu:

1. “Dapat digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.

2. Dapat digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya.
3. Dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan.
4. Dapat diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi dan keandalan laporan keuangan.
5. Dapat menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.”

Adapun menurut Dhedy Triwardana, (2017) manfaat Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penerapan SAP adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh kepada stakeholder. Selain itu dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.”

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

2.1.1.5 Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintahan

Berikut poin-poin dan penjelasan mengenai karakteristik PSAP pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai dijelaskan dalam peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktrual oleh pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. PSAP No 01 Penyajian Laporan Keuangan.

Menurut Erlina (2019:11), tentang Penyajian Laporan keuangan adalah:

“Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Sedangkan, basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.”

2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Menurut Erlina (2019:23), tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah:

“Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemekaaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.”

3. PSAP No 03 Laporan Arus Kas

Menurut Erlina (2019:70), tentang Laporan Arus Kas adalah:

“Laporan arus kas menyediakan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo aktif kas pemerintahan pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang termasuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.”

4. PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut Erlina (2019:80), tentang Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

“Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rinci dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuistas, neraca, dan laporan arus kas. CALK mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas

pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.”

5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi

Persediaan adalah:

“Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan juga pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepengurusannya berpindah.”

6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi

Menurut Erlina (2019:176), tentang Akuntansi Investasi adalah:

“Penilaian Investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

- a. Metode Biaya Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan atau sebesar biaya perolehan.
- b. Metode Ekuitas Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (investee), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah.
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat/jangka waktu yang pendek.”

7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Menurut Erlina (2019:194), tentang Akuntansi Aset Tetap adalah:

“Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila aset tetap dihitung dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara

kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.”

8. PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Menurut Erlina (2019:215), tentang Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan adalah:

“Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasi ke dalam aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka Panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan kepos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.”

9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban.

Menurut Erlina (2019:235), mengemukakan pendapatnya tentang Akuntansi Kewajiban adalah:

“Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan/telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Dalam hal ini kewajiban dicatat sebesar nilai perolehan.”

10. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan.

Menurut Erlina (2019:176), tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan adalah:

“Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.”

11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Menurut Erlina (2019:260), mengemukakan pendapatnya tentang Laporan Keuangan Konsolidasian adalah:

“Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.”

2.1.1.6 Unsur-unsur Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Abdul Halim (2019:167), Prosedur dalam penerapan standar akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. “Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Selain Kas
4. Prosedur Akuntansi Aset.”

Adapun penjelasan terkait dengan prosedur penerapan standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan dan pengikhtisaran atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada OPD atau SKPKD

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada OPD atau SKPKD.

3. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian selain kas.

4. Prosedur Akuntansi Aset

Prosedur Akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan.

Menurut Baldric Siregar (2017:105), Prinsip dalam standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. “Basis Akuntansi
2. Realisasi
3. Substansi mengungguli bentuk formal
4. Konsisten
5. Penyajian secara wajar”

Adapun Penejelasan terkait dengan prinsip dalam Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-laporan operasional (LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

2. Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

3. Substansi mengungguli bentuk formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain

tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

5. Penyajian secara wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Setiap organisasi publik maupun non-publik diharapkan menyajikan laporan keuangan yang informasinya dapat digunakan oleh pihak yang

memerlukannya. Laporan keuangan yang disajikan harus mengacu kepada standar yang berlaku dan memenuhi karakteristik informasi yang berkualitas.

Menurut Erlina Rasdianto, (2020:146) pengertian dari kualitas laporan keuangan sebagai berikut :

“Kualitas laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, dan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengembalian keputusan ekonomi oleh pihak- pihak yang memerlukan.”

Adapun pengertian Kualitas Laporan Keuangan menurut Indra Bastian (2019:49) adalah sebagai berikut :

“Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”

Menurut Gina Thania (2021), definisi Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan.”

Menurut Rama ardianto (2019), definisi Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas.”

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kualitas laporan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah idealnya suatu laporan keuangan yang menunjukkan gambaran yang akurat dan sesuai dengan posisi keuangan serta kinerja pemerintah dalam mengelola dana publik serta laporan keuangan yang berkualitas mampu memberikan informasi terbaik bagi para penggunanya.

2.1.2.2 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa maksud dari karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah :

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2), dan Mahmudi (2019:16) menjelaskan mengenai karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yakni :

- a. Relevan;
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan; dan
- d. Dapat dipahami.

Berikut penjelasan dari karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yaitu :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegakkan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki karakteristik :

a. Memberikan Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang.

b. Memberikan Manfaat Prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerha di masa datang.

c. Disajikan Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam pengguna informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Laporan keuangan yang berkualitas terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.

b. Dapat diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Laporan

keuangan berkualitas jika dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit independen.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Penyajian laporan keuangan tidak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Dapat Dibandingkan artinya Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Dapat Dipahami artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Indra Bastian (2017:35) mengemukakan pendapatnya bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari :

1. Dapat dipahami
Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi, serta mempunyai kemauan untuk belajar tentang informasi yang disampaikan.
2. Relevan
Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas yang relevan apabila informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam menilai peristiwa masa lalu dan masa kini, atau memprakirakan masa depan.
3. Keandalan
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas yang andal jika, bebas dari pengertian yang menyesatkan kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya.
4. Dapat diperbandingkan
Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan secara relatif. Pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode entitas yang sama dan untuk entitas yang berbeda.

Menurut Winwin Yadianti (2017:16-17) karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu:

1. “Relevan (*Relevance*), yaitu melakukan seleksi informasi yang paling mungkin membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi para pengguna.
2. Dapat Dipahami (*Understandability*), yaitu informasi terpilih tidak hanya penting tapi harus dapat dimengerti pengguna.
3. Dapat diverifikasi (*Verifiability*), yaitu hasil akuntansi dapat dikuatkan oleh pihak lain dengan menggunakan teknik pengukuran yang sama.
4. Kenetralan (*Neutrality*), yaitu informasi akuntansi darahkan pada kebutuhan umum para pengguna bukan hanya sekedar kebutuhan khusus pengguna tertentu.

5. Tepat Waktu (*Timeliness*), yaitu pemberian informasi dilakukan sedini mungkin untuk menghindari keterlambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
6. Dapat Dibandingkan (*Comparability*), yaitu perlakuan akuntansi yang berbeda tidak seharusnya memberikan hasil yang berbeda.
7. Kelengkapan (*Completeness*), artinya informasi yang disediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi para pemakai.”

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan karakteristik kualitas laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan dan Dapat Dipahami.

2.1.2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitats pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Secara spesifik berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi, kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivasnya.

Adapun menurut Abdul Hafiz Tanjung (2018:12), Tujuan Laporan

Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut Kasmir (2018:10), Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu.”

Selaras dengan itu, tujuan laporan keuangan menurut Prastowo (2018:3), yaitu :

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Adapun menurut Winwin Yadiani (2017:6), Tujuan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan bertujuan sebagai sarana pengambilan keputusan bagi pihak eksternal seperti investor dan kreditur. Dengan laporan keuangan pihak eksternal yaitu investor dapat mengetahui tingkat keamanan investasinya serta dividen yang diharapkan dan bagi kreditur bertujuan dapat mengetahui dan memprediksikan kestabilan pengambilan keputusan melalui laporan keuangan.”

Sedangkan menurut Rukmini juwita (2019), Tujuan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan bertujuan untuk pengambilan keputusan dari pihak berwenang, sehingga bermanfaat pada informasi yang diperlukan mengenai LKPD yang dapat disesuaikan.”

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak internal maupun pihak eksternal sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.1.2.4 Peranan Laporan Keuangan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010, Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan berguna untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan

efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun peranan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan suatu entitas dalam melaksanakan peranannya terhadap laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Ewuity*)
5. Evaluasi Kerja

Berikut penjelasan Peranan Laporan Keuangan, adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas artinya akuntabilitas dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen artinya manajemen membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. **Transparansi** artinya transparansi dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. **Keseimbangan Antargenerasi** artinya membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
5. **Evaluasi Kinerja** artinya mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Menurut Mursyidi (2019:44), Peranan Laporan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Berikut penjelasan peranan laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.

4. Keseimbangan

Antargenerasi (*Intergenerational Equity*) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.1.2.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Bedasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Abdul Halim (2019:44) menyatakan mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis aktual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*)
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
2. Pelaporan Finansial (*financial report*)
 - a. Neraca
 - b. Laporan Operasional (LO)
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - d. Laporan Arus Kas (LAK)
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Komponen Laporan

Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Selanjutnya menurut Erlina (2013:23), Laporan Keuangan Pemerintah terdiri

dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan SAL
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Laporan Arus Kas (LAK)

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Untuk penjelasan mengenai komponen laporan keuangan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakai sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintahan lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepala entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu

- e. Dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang mencakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut ;

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah atau masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan

jasa untuk masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diharapkan karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masingmasing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak pemerintah atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dan perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,

tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahan pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, Neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencangkup informasi tentang akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas adalah konsep yang secara luas terkait dengan tanggung jawab, baik bagi individu atau kelompok, terhadap tugas, tindakan, dan hasil kerja

mereka. Lebih dari sekadar kewajiban, akuntabilitas melibatkan komitmen untuk menjelaskan, serta mempertanggungjawabkan tindakan kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kepentingan. (Mansyuer & Effendi, 2020)

Menurut (Majid, 2019; 47) pengertian dari akuntabilitas adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada legislatif dan masyarakat”.

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2018; 27) pengertian dari akuntabilitas, adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik berarti bahwa semua proses penganggaran harus dapat dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat”.

Definisi kinerja instansi pemerintah menurut keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja instansi pemerintah difokuskan pada pengukuran kinerja terhadap satuan kerja atau entitas dilingkungan pemerintah.

Adapun menurut (Mahsun, 2016) fokus pengukuran kinerja untuk setiap satuan kinerja atau entitas yang mencakup :

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran
2. Tugas pokok dan fungsi
3. Struktur organisasi dan personalia

4. Program kerja
5. Anggaran

Dalam pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kinerja (*performance*) merupakan hasil kerja yang telah dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja atas pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

”Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.”

Selanjutnya pendapat mengenai definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Arjuna, Annie Mustika Putri, 2018) adalah sebagai berikut :

”Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai perwujudan suatu instansi yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan organisasinya sesuai rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama suatu periode tertentu”

Sejalan dengan itu, menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

”Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.”

Definisi lain mengemukakan definisi lain akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut (LAN, 2013:3), yaitu :

”Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.”

Adapun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut LAN (2014), sebagai berikut :

”Akuntabilitas dapat diartikan sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung.”

Penulis dapat menarik kesimpulan definisi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah tanggung jawab instansi pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerja mereka dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini mencakup transparansi dalam proses pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya, serta pelaporan hasil dan dampak dari kegiatan yang dilakukan.

2.1.3.2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran strategis suatu instansi, dimana laporan tersebut disusun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama satu tahun.

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003) menjelaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) disusun dalam rangka untuk mewujudkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya tugas dan target capaian dalam mengelola sumber daya dan menjalankan kebijakan/program pemerintah, yang disusun dengan azas akuntabilitas yang baik. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan target dan sasaran kerjanya kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai salah satu media yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Tentu, dukungan dari masyarakat dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah akan sangat membantu terwujudnya semua harapan atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tercapainya semua target kegiatan dapat dipantau melalui indikator

dari setiap rincian kegiatannya. Pencapaian tujuan dan target kegiatan selama tahun-tahun tertentu harus disesuaikan dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh walikota. Dimana perjanjian tersebut menganut prinsip-prinsip pemerintahan yang akuntabel, transparan, berorientasi hasil dan berusaha mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

Dalam penyusunan LAKIP, suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Adapun salah satu manfaat dari LAKIP ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama satu tahun anggaran. Sebelum instansi pemerintah menyampaikan laporan dimana dalam laporan tersebut memuat tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam waktu satu tahun yang kemudian dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), terlebih dahulu ada sebuah rangkaian tahapan yang digunakan untuk menyusun LAKIP. Sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan kesatuan dimulai dari proses perencanaan strategik. Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi khususnya di bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur, perlu dilakukan serangkaian upaya yang

terpadu di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi perubahan *mind-set* dan *culture-set* dari para aparatur negara untuk mewujudkan SDM Aparatur yang lebih siap menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Salah satu langkah persiapan dalam rangka mencetak Sumber Daya Manusia dan Aparatur yang mumpuni tersebut adalah dengan melakukan berbagai persiapan perumusan kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur sehingga diharapkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Aparatur yang kompeten, kompetitif, dan berintegritas dapat tercapai (LAKIP Kemenpanrb, 2019).

2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintah yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik.

Terdapat beberapa indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikemukakan oleh Arja Sadjiarto (2016, 77-82) adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan strategik
 - a. Menentukan program dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat
 - b. Menetapkan misi diadakannya suatu program dan menetapkan sistem pertanggungjawaban
2. Perencanaan program
 - a. Mengidentifikasi dan menetapkan tujuan dan sasaran program
 - b. Mengidentifikasi hasil (*outcomes*)
 - c. Menilai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
 - d. Menentukan prioritas dari berbagai tujuan dan sasaran, mengevaluasi kelayakan program
3. Menetapkan prioritas & Alokasi sumber daya
 - a. Menentukan prioritas dari berbagai permohonan, mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan.
 - b. Memberikan umpan balik atas prioritas yang telah disusun.
 - c. Menganalisis permohonan

- d. Mengambil keputusan untuk memenuhi permohonan yang disampaikan
- 4. Perencanaan dan pengorganisasian kegiatan
 - a. Menetapkan dan modifikasi strategi yang ada
 - b. Menetapkan keluaran (*output*)
 - c. Melaksanakan proses dan kegiatan, menetapkan tujuan dan sasaran tahunan, menetapkan cara pengukuran.
 - d. Mengaitkan sumber daya dengan *output* dan *outcome*
- 5. Manajemen operasi
 - a. Menetapkan sistem manajemen
 - b. Memberikan *feedback* atas hasil yang diperoleh
 - c. Melakukan pengawasan biaya dan kualitas layanan yang disediakan
 - d. Memproduksi barang dan jasa
- 6. Monitor kegiatan dan pengukuran pencapaian
 - a. Mendapatkan informasi mengenai pencapaian (*results*)
 - b. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian
 - c. Menggolongkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan oleh pihak lain selain pemerintah
 - d. Melakukan pengukuran pencapaian
- 7. Analisis pencapaian, pelaporan pencapaian, dan mendapatkan umpan balik mengenai pencapaian tersebut
 - a. Melakukan analisis untuk pencapaian jangka panjang dan jangka pendek
 - b. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian, memahami strategi dan *output*
 - c. Melakukan verifikasi atas informasi kinerja, melakukan evaluasi kinerja dan audit
 - d. Melaporkan pencapaian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat dipercaya

Indikator-indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut

(Urip dan Yohanes, 2018:22), yaitu :

1. Sumber daya organisasi telah diperoleh, dilindungi dan digunakan secara hemat dan efisien yaitu kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada dibawah anggaran maka terjadi pemborosan.
2. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan kehematan dan efisien.
3. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

4. Kesesuaian antara program atau kegiatan dengan visi serta misi instansi pemerintah.
5. Dampak seluruh program atau kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap masyarakat yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan sasaran sehingga tercipta mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

Menurut Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Permen PAN & RB No.88 Tahun 2021 terdapat 5 dimensi dalam pengukuran akuntabilitas kinerja, sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Rencana Strategis
 - b. Rencana Kinerja Tahunan
 - c. Penetapan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Pemenuhan Pengukuran
 - b. Kualitas Pengukuran
 - c. Implementasi Pengukuran
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Pemenuhan Laporan
 - b. Penyajian Informasi Kinerja
 - c. Pemanfaatan Informasi Kinerja
4. Evaluasi Internal
 - a. Pemenuhan Evaluasi
 - b. Kualitas Evaluasi
 - c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi
5. Capaian Kinerja
 - a. Kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*)
 - b. Kinerja lainnya.

2.1.3.4 Prinsip-prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, agar AKIP dapat terwujud dengan baik harus dipenuhi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi yang bersangkutan.

2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

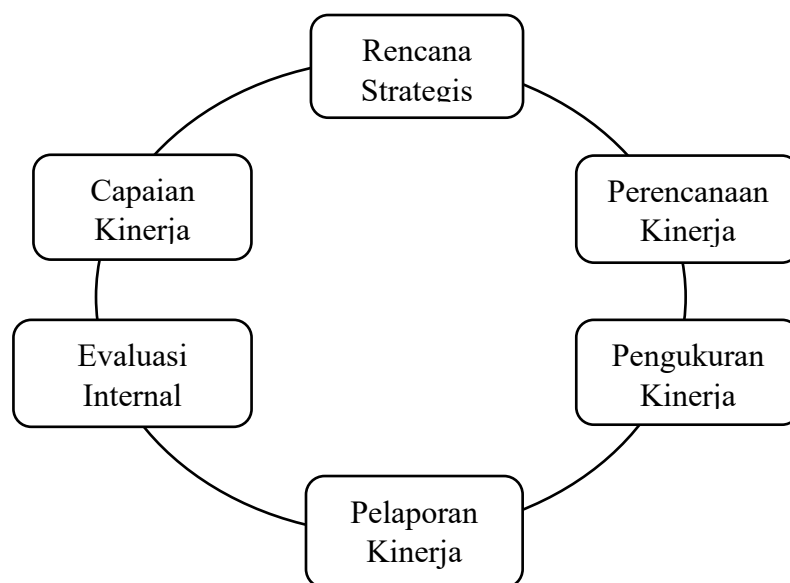
Selain prinsip-prinsip tersebut diatas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.1.3.5 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut (www.pusdiklatwas.bpkp.go.id) :

1. Perencanaan strategis
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : www.pusdiklatwas.bpkp.go.id

Gambar 2. 1 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun penjelasan mengenai tahapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP, 2017 : 20) adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan Stratejik (Renstra)

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada gambar diatas, dimulai dari penyusunan perencanaan stratejik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun.

Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target yang ingin dicapai (*output/outcome*) dari seluruh sasaran strategik dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana Kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggara pemerintahan untuk suatu periode tertentu.

2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, serta indikator kinerja yang terukur, sebagai dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Perencanaan kinerja ini mencakup penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kinerja tahunan (RKT) yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan instansi.

3. Pengukuran Kinerja

Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah penukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja.

4. Pelaporan Kinerja

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

5. Evaluasi Internal

Selanjutnya, informasi yang termuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut digunakan untuk perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

6. Capaian Kinerja

Tahap terakhir yaitu capaian kinerja merupakan hasil yang telah dicapai oleh instansi pemerintah sebagai realisasi dari rencana kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja ini diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja, baik itu pada tingkat *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil) yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan.

2.1.3.6 Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dikenali sebagai berikut:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran

Penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran sangat penting untuk menentukan tujuan dan hasil yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Kejelasan ini berkontribusi positif terhadap akuntabilitas kinerja

2. Penerapan Akuntansi Publik

Penerapan prinsip-prinsip akuntansi publik yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan akuntansi publik juga berkontribusi pada akuntabilitas kinerja

3. Regulasi dan Komitmen Manajemen

Regulasi yang jelas dan komitmen manajemen yang kuat juga mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Instansi yang memiliki regulasi yang jelas dan manajemen yang komitmen akan lebih mudah mencapai tujuan akuntabilitas kinerja.

4. Sistem Pelaporan Kinerja

Sistem pelaporan kinerja yang efektif berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Sistem ini membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis data kinerja, sehingga memudahkan evaluasi dan peningkatan kinerja.

5. Sistem Pengendalian Intern (SPIP)

Sistem pengendalian intern yang kuat dapat memperkuat hubungan antara berbagai faktor, seperti kompetensi sumber daya manusia dan kepatuhan terhadap pedoman, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SAKIP. SPIP berperan penting dalam memastikan bahwa proses pengelolaan dan pelaporan kinerja dilakukan dengan akurat dan transparan.

6. Pertanggungjawaban Anggaran

Pertanggungjawaban anggaran yang efektif juga mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Pertanggungjawaban ini membantu dalam memastikan bahwa

penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan penelitian terdahulu yaitu, Sistem Akuntansi Keuangan (Mas'ut, Ika Puspita Dewi, Muhammad Joni Barus ; 2019), Pelaporan Laporan Keuangan (Bambang Jamiko, Nano Prawoto, Rini Juni Astuti ; 2019), Aksesibilitas Keuangan Daerah (Bambang Jamiko, Nano Prawoto, Rini Juni Astuti ; 2019), dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Galuh Syarifah Mentari, Dahana Nasyiah Hasanah Purnomowati ; 2022).

Dengan demikian, kombinasi dari faktor-faktor di atas berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.1.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa orang terkait dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu dalam penelitian dapat membantu penulis untuk dijadikan sebagai bahan acuan melihat seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang memiliki kesamaan dalam penelitian, kemudian dapat diajukan sebagai hipotesis beberapa penelitian terkait dengan variabel-variabel yang tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| NO | Judul Penelitian/Tahun | Penulis | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|---|--|
| 1. | Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara) | Mas'ut , Ika Puspita Dewi, Muhammad Joni Barus (2019) | Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, heteroskedastisitas dan multikolonieritas, analisisregresi linier berganda serta uji hipotesis dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi | Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, kualitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, pada Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. |

| NO | Judul Penelitian/Tahun | Penulis | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|---|---|
| 2. | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato) | Purnama Sari, Tamsir (2023) | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survey, sehingga informasi yang diperoleh berupa kuesioner yang telah diisi oleh responden. Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi berganda | Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato. |
| 3. | Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Annisa Ayu Riyani, Tituk Diah Widajantie (2022) | Penelitian ini memakai metode kuantitatif memakai data primer. Obyek pada penelitian ini meliputi SAP, kualitas laporan keuangan di Akuntabilitas kinerja instansi. Teknik pengambil sampel memakai nonprobability sampling memakai | Hasil penelitian ini memperlihatkan Standar akuntabilitas pemerintah memberi pengaruh pada akuntabilitas kinerja pemerintah, kualitas laporan keuangan tak memberi pengaruh pada akuntabilitas |

| NO | Judul Penelitian/Tahun | Penulis | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|--------------------------------|---|--|
| | | | metode purposive sampling | kinerja instansi pemerintah. |
| 4. | Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah | Nugraeni, M. Budiantara (2015) | Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif memakai data primer. Sampel penelitian ini terdiri dari pegawai bagian akuntansi di kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Yogyakarta. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis jalur | Hasil penelitian ini memperlihatkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja. Sedang kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Terbentuk struktur baru dari analisis jalur |

| NO | Judul Penelitian/Tahun | Penulis | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|-------------------------------|---|--|
| | | | | yang didukung oleh bukti empirik. |
| 5. | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Siber dan Sandi Negara | Sutrisno, Indri Astuti (2021) | Penelitian lapangan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan penelitian populasinya adalah Bagian Keuangan BSSN. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode kuesioner. Penulis menggunakan uji regresi linier ganda dan uji hipotesis dengan SPSS | Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa variabel kualitas pelaporan keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. |

| NO | Judul Penelitian/Tahun | Penulis | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|-----------------------------------|--|--|
| 6. | Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada OPD Kabupaten Lampung Timur) | Fika Mudrikah, Karnila Ali (2021) | Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling untuk dinas atau organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 20. Model analisis data yang digunakan adalah persamaan regresi linier sederhana dan uji interaksi | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) implementasi standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (2) kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (3) komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dapat menghubungkan antara implementasi standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. |

| NO | Judul Penelitian/Tahun | Penulis | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|--|--|---|
| 7. | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Kupang) | Novita Fitriyani, Helmi Herawati (2020) | Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas; dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan secara parsial kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah. akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. |
| 8. | Analysis Quality Of Financial Statements and Application Of Government Accounting Standards To Accountability Of Performance Of Government Agencies In Pegunungan Bintang Regency | Ramasoyan, Pascalina Van Sweet Sesa, Kurniawan Patma, Rudiawie Larasati (2021) | This research uses quantitative analysis method. Data Analysis Techniques In this study, the analysis techniques used are multiple linear analysis with the help of SPSS Statistics 16.0 software. The questionnaire used to measure | This tests hows that was accepted so that it can be concluded the application of government accounting standards and the quality of financial statements has a significant impact on the |

| NO | Judul Penelitian/Tahun | Penulis | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|--|--|--|
| | | | dependent variables is a questionnaire developed from previous researchers that relates to these variables. | accountability of the performance of government agencies at the Regional Device Organization (OPD) in Pegunungan Bintang District |
| 9. | Application of Government Accounting Standards, Financial Statements Reporting, and Accessibility of Regional Finance Against Accountability for Regional Financial Management (Survey of All OPDs of Kulon Progo Regency Government) | Bambang Jatmiko, Nano Prawoto, Rini Juni Astuti (2019) | This research was conducted in Kulon Progo Regency. The object of this study is the Kulon Progo District Regional Work Unit (OPD). Meanwhile, the subjects in this study were employees who were in the OPD of the Kulon Progo Regency Government. The type of data used in this study is primary data. The questionnaire was distributed directly to the respondents in each Kulon Progo Regency OPD according to the specified sample. | The results are The application of government accounting standards (SAP) has a positive effect on the accountability of regional financial management; The presentation of regional financial statements has a positive effect on the accountability of regional financial management; Accessibility of regional financial reports has a positive effect on accountability in regional financial management. |

| NO | Judul Penelitian/Tahun | Penulis | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|---|---|
| | | | The sampling method employed in this study was purposive sampling (Palys, 2008). | |
| 10 | The Influence of Financial Statements and Application Of Government Accounting Standards on The Performance Accountability of Sumenep Government Institutions | Fidya Istiqfarini, Tituk Diah Widajantie (2023) | The method used in this research is a quantitative method. The population in this study was 51 Regional Apparatus Organizations in Sumenep Regency. The sample of this research is 15 regional offices and 5 regional agencies with a total of 60 respondents. The data analysis technique used is using Partial Least Square (PLS) with the software SmartPLS 3.0. | The results of this study indicate that the clarity of budget targets has an insignificant positive effect on accountability for government agency performance, this indicates that the clarity of budget targets can increase accountability for the performance of government agencies, but the effect is not too large. Government accounting standards and reporting systems have a significant positive effect on accountability |

| NO | Judul Penelitian/Tahun | Penulis | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|--|--|--|
| | | | | for government agency performance. |
| 11 | The Effect of Government Accounting Standard Application on the Quality and Financial Statement on The Performance Accountability (STUDY ON REGIONAL APPARATUS ORGANIZATIONS OF KARANGANYAR REGENCY) | Galuh Syarifah Mentari, DahanaNasyiah Hasanah Purnomowati (2022) | This research belongs to a quantitative study by interpreting the respondents' responses into numbers or scores. This research uses primary data gathered by distributing questionnaires to financial management staff in each OPD | This study concludes that the importance of implementing SAP in financial statement preparation and presentation has a positive impact on the quality of financial statements, namely obtaining an unqualified opinion from BPK. |

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari apa yang ingin dibahas oleh peneliti. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak tiga variabel yaitu dua variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan yaitu: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengertian kerangka pemikiran menurut Sudaryono (2017:21) adalah sebagai berikut :

“Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaiman teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting”

Sedangkan menurut Sugiyono (2019: 60) pengertian dari kerangka berpikir adalah sebagai berikut:

“Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan kerangka model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.”

2.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mempunyai tujuan untuk memberikan suatu pedoman dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun pada tingkat daerah. Standar akuntansi pemerintah merupakan suatu yang nantinya akan membantu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah di Indonesia. Ini artinya standar yang diatur dalam SAP akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Standar Akuntansi Pemerintahan memungkinkan pengukuran kinerja yang lebih terukur dan terstandar, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi apakah instansi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika instansi pemerintah secara konsisten menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini akan meningkatkan

kredibilitas dan kepercayaan publik, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah bertindak secara bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, yang merupakan inti dari akuntabilitas. Secara keseluruhan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memperkuat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan standar yang diakui. Penerapan Standar akuntansi pemerintahan yang baik dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan. Dengan laporan yang lebih transparan, publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat menilai kinerja instansi pemerintah secara lebih objektif. Ini pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas, karena instansi pemerintah akan lebih bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran dan sumber daya. (Mardiasmo, 2019 : 78)

Selanjutnya Mahmudi (2019 : 15) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi yang transparan dan akurat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika laporan keuangan dipublikasikan dengan jujur dan terstandarisasi, masyarakat cenderung lebih percaya bahwa pemerintah mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa Ayu Riyani, Tituk Diah Widajantie (2022) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita Fitriyani, Helmi Herawati (2020) yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pengertian teori diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah digunakan pemerintahan sebagai standar dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka sampai pada pemahaman penulis bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.2.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Saat ini kinerja pemerintah daerah masih menjadi perhatian publik karena masyarakat belum merasakan dampak yang baik. Namun dengan terwujudnya konsep otonomi pemerintahan daerah, memberikan harapan baru kepada masyarakat agar pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah merupakan hasil dari pengelolaan keuangan negara, yang dimana laporan keuangan berperan sangat penting sebagai bentuk wujud dari pertanggungjawaban pemerintah, sehingga laporan keuangan harus berkualitas agar dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan itu sendiri

Kualitas Laporan Keuangan bisa memberi pengaruh Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam PP No 71 tahun 2010 Pasal 1 ayat (2), Karakter kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus diwujudkan di informasi akuntansi hingga bisa menggapai tujuannya. Empat karakter tersebut ialah pra-syarat normatif yang dibutuhkan supaya laporan keuangan pemerintah bisa sesuai kualitas yang diinginkan, keempat karakteristik tersebut yakni: relevan, andal, bisa diperbandingkan serta bisa difahami. Sehingga semakin baik

karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dihasilkan instansi pemerintah. Kualitas Laporan Keuangan mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah memenuhi tanggung jawabnya kepada publik. Laporan yang disusun dengan baik menunjukkan bahwa instansi tersebut bertindak secara profesional dan bertanggung jawab, yang merupakan inti dari akuntabilitas kinerja. (Indra Bastian , 2019 : 68)

Selanjutnya Mardiasmo (2018 : 47) menyatakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan yang tinggi memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Ketika laporan keuangan berkualitas tinggi, pemangku kepentingan dapat mengandalkan informasi tersebut untuk menilai kinerja pemerintah secara obyektif, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Mas'ut, Ika Puspita Dewi, Muhammad Joni Barus (2019) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni dan M. Budiantara (2015) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan teori-teori dan penelitian sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.2.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik oleh instansi pemerintah serta kualitas laporan keuangan yang optimal dari pihak eksternal maupun internal diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Instansi pemerintah yang wajib menerapkan pelaporannya adalah instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk mewujudkan akuntabilitas, dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa media pertanggungjawaban yang dapat memberikan informasi apakah program yang dilaksanakan sesuai rencana yang digunakan, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Pratama, 2019).

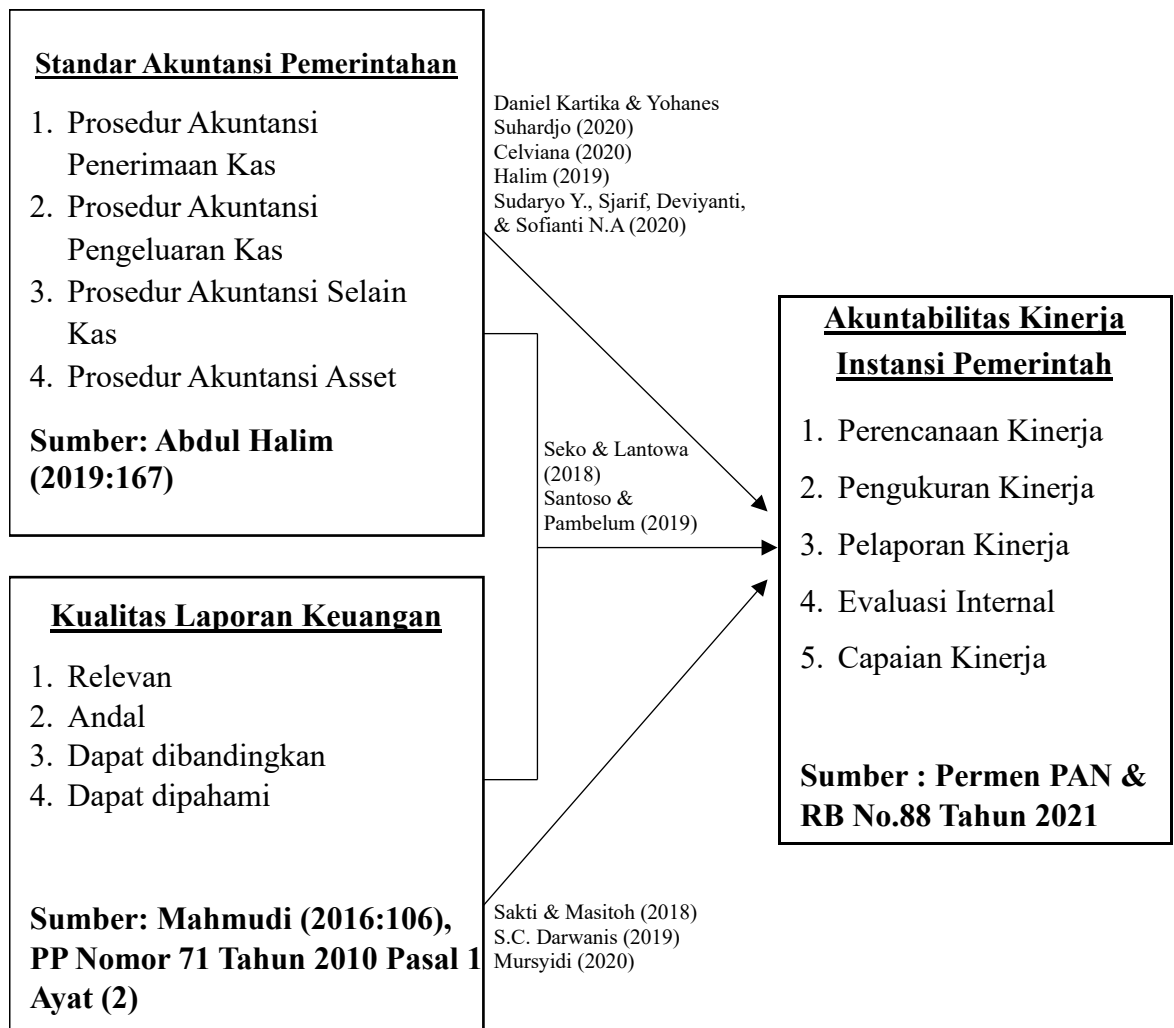
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Tuntutan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah wajib memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan, berkualitas, adanya pembagian tugas yang baik, serta dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang telah diamanatkan. Pengukuran kinerja ini dinilai penting, sebab dengan adanya hal ini, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam mengelola sumber daya negara dan membuat kebijakan bagi pelaksanaan kegiatan negara. Menurut Mardiasmo (2019 ; 19) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban instansi pemerintah untuk bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan, serta hasil pelaksanaan program atau kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka pencapaian tujuan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban instansi pemerintah untuk memberikan informasi, penjelasan, dan tanggung jawab atas hasil serta dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan, yang ditujukan untuk memastikan bahwa kinerja tersebut sesuai dengan standar dan harapan yang ditetapkan. (Mahsun, 2018 : 59). Selanjutnya Purnama Sari dan Tamsir (2023) mengemukakan pendapatnya bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian replika serta penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maka dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2. 2

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:99) pengertian hipotesis dalam bukunya, yaitu:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian adalah jawaban yang bersifat sementara atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah karena hanya didasarkan pada teori yang relevan belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang didapatkan dari pengumpulan data.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis 2 : Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis 3 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan
Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah